



Buletin Parlementaria

Nomor 1073/I/X/2019 • Oktober 2019

DPR Baru Semangat Baru Bangun NKRI



**11 Ketua DPR Terpilih
Janjikan Kinerja
Parlemen Semakin Baik**



**12 DPR Harus
Komitmen pada
Kepentingan Bangsa**



9 772614 339005

DPR Baru Semangat Baru Bangun NKRI

Pelantikan Anggota DPR RI baru periode 2019-2024 menjadi semangat baru dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 575 wakil rakyat terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 disumpah menjadi Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna ke I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. Sebanyak 49,74 persen atau sebesar 286 orang merupakan anggota baru

yang pertama kali menjadi Anggota Dewan. Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPR RI tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Rapat pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR RI yang ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan usia, yaitu Anggota DPR RI tertua Abdul Wahab Dalimunthe (F-Demokrat) dan Anggota DPR RI termuda Hillary Brigitta Lasut (F-NasDem). Pengambilan sumpah/

janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali. Semua Anggota DPR RI secara bersama-sama melafalkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai Anggota Parlemen.

Lafal sumpah/janji yang diucapkan adalah “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk



Pengambilan sumpah/janji Anggota DPR RI periode 2019-2024 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Foto: Andri/HR



Perwakilan kelompok agama menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR RI periode 2019-2024. Foto: Odji/HR

”

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DPR DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945.

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Usai disumpah, masing-masing anggota menandatangani berita acara sumpah/janji. Secara simbolis penandatanganan berita acara juga dilakukan lima anggota DPR RI dari perwakilan lima agama. Acara pengambilan sumpah para anggota DPR RI ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para duta besar negara sahabat, para menteri, dan pimpinan lembaga ikut menyaksikan acara ini.

Di akhir acara, Pimpinan lama DPR RI menyerahkan buku memori DPR RI 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPR RI. Adapun Pimpinan lama yang hadir pada pengambilan sumpah dan janji ini adalah Bambang Soesatyo, Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Utut Adianto. ■ dep,mh/es



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P., S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan



Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024 terpilih, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar mengucapkan sumpah/janji sebagai Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024. Foto: Kresno/HR

DPR RI telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 31 dalam Rapat Paripurna ke II DPR RI, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10), yang memutuskan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI Masa Bakti 2019-2024. Ini sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pimpinan Sementara DPR RI dan perwakilan partai politik yang digelar sebelumnya pada hari yang sama.

Keputusan tersebut menetapkan, Ketua DPR RI Puan Maharani (Fraksi PDI-Perjuangan/dapil Jawa Tengah V),

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar/dapil Lampung II), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra/dapil Banten III), Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel (Fraksi NasDem/dapil Gorontalo), dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB/dapil Jawa Timur VIII).

Penetapan Pimpinan DPR RI ini berdasar pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) Pasal 42, 427 di ayat 1, susunan dan mekanisme penetapan Pimpinan DPR RI masa keanggotaan DPR RI setelah hasil Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan, Pimpinan DPR terdiri dari satu orang

ketua dan empat orang wakil ketua, yang berasal dari partai politik, berdasarkan urutan perolehan suara dan kursi terbanyak di Parlemen.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, Ketua DPR RI adalah Anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI, hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sementara Wakil Ketua DPR RI ialah Anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Sebelumnya Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe (F-Demokrat/dapil Sumatera Utara I)

dan Hillary Brigitta Lasut (F-NasDem/dapil Sulawesi Utara) yang memimpin rapat menanyakan persetujuan kepada seluruh Anggota DPR RI, “Apakah dapat kita setuju dan kita tetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI?” tanya Abdul Wahab, seketika dijawab serentak oleh para Anggota Dewan “setuju” lalu disambut tepuk tangan riuh oleh para hadirin rapat, ketukan palu sidang menjadi pertanda pengesahan.

Selanjutnya Pimpinan DPR RI masa bakti 2019-2024 mengucapkan sumpah/janji yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Sumpah yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.

Adapun petikan lafal sumpah yang diucapkan para Pimpinan DPR RI, sebagai berikut, “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Pimpinan DPR RI bersumpah, bahwa dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.

“Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar para Pimpinan DPR RI.

Setelah pengucapan sumpah/janji, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah, oleh Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, rohaniawan, dan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya penyerahan kepemimpinan DPR RI masa bakti 2019-2024 ditandai dengan penyerahan palu sidang dari Pimpinan Sementara DPR RI kepada Ketua DPR RI terpilih dan penyerahan buku memori masa bakti 2014-2019.

■ eko/sf



Ketua DPR RI Puan Maharani mewakili Pimpinan DPR RI lainnya menerima palu persidangan dari Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe. Foto: Kresno/HR



Perwakilan kelompok agama Anggota MPR RI menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji Anggota MPR RI Periode 2019-2024. Foto: Odjie/HR

711 Anggota MPR Resmi Dilantik

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) masa jabatan tahun 2019-2024 resmi dilantik pada Selasa 1 Oktober 2019. Anggota MPR RI terdiri dari 575 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan 136 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Hatta Ali memandu pengucapan sumpah/janji Anggota MPR RI. Sumpah/janji

yang diucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Upacara pengucapan sumpah/janji Anggota MPR RI ini diawali dengan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh perwakilan Anggota DPD RI tertua Sabam Sirait (82 tahun), dan Anggota DPR RI termuda Hillary Brigitta Lasut (23 tahun). Seluruh Anggota MPR

RI mengucapkan sumpah secara bersamaan, dan para wakil kelompok sumpah/janji dari setiap agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Adapun sebagian petikan bunyi sumpahnya adalah sebagai berikut.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Setelah pengucapan sumpah dan janji selesai, para wakil kelompok sumpah/janji Anggota MPR RI, para rohaniawan dan Ketua Mahkamah Agung menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji secara simbolis. ■ eko/es

136 Anggota DPD Terpilih Ucapkan Sumpah

Pengucapan sumpah atau janji Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia resmi diselenggarakan pada acara Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, di Ruang Rapat Paripurna I MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh 136 Anggota DPD RI terpilih ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 terkait Peresmian Keanggotaan DPD RI periode 2019-2024 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek di hadapan rapat.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

”

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...

Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan ke tahun 2019-2024,” ujar Sesjen DPD RI.

Ke-136 senator diambil sumpah atau janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali. ‘Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,” tutur Ketua MA yang diikuti seluruh Anggota DPD RI.

Agenda pembacaan sumpah atau janji Anggota DPD RI terpilih pada Sidang Paripurna ini dipimpin senator tertua dan termuda. Senator tertua yaitu Sabam Sirait, Anggota DPD

RI dapil Jakarta berusia 82 tahun. Sedangkan, senator termuda yaitu Jialika Maharani, Anggota DPD RI dapil Sumsel yang baru berusia 22 tahun memimpin sidang pembacaan sumpah/janji 134 senator lainnya.

Turut hadir menyaksikan pengambilan sumpah dan janji Anggota DPD RI terpilih ini Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Kalla, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. ■ pun/sf



Anggota DPD RI Sabam Sirait (82 tahun), dan Anggota DPD RI termuda Jialika Maharani (22 tahun) memimpin sidang pembacaan sumpah/janji 134 senator IPeriode 2019-2024. Foto: Andri/HR

Semangat Kolektif Kolegial Pimpinan DPR Bangun NKRI

Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani dalam pidato perdananya menekankan semangat kolektif kolegial untuk membangun NKRI. Hanya semangat gotong royong, sebagaimana pandangan hidup bangsa Indonesia dan niat pengabdian yang tulus maka semua Anggota DPR RI dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Demikian disampaikan Puan Maharani setelah ditetapkan menjadi Ketua DPR RI Periode 2019 - 2024 secara aklamasi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) malam. Dalam kesempatan ini juga ditetapkan empat Wakil Ketua DPR RI dari F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, dan F-PKB.

"Kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama, untuk bersama-sama memantapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, UU Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Puan dalam pidatonya.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, lanjutnya, DPR RI diharapkan dapat ikut mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna untuk pertama kalinya usai ditetapkan menjadi Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024. Foto: Andri/HR

"Walaupun fungsi-fungsi di DPR akan berjalan secara dinamis, namun hal ini tidak boleh membuat kita menjadi terpecah belah dan kontraproduktif. Dinamika dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR tetap berjalan pada landasan utamanya yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga kepentingan nasional, bangsa dan negara yang diutamakan," jelas Puan.

Dalam menjalankan amanah selama 5 tahun ke depan, politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, DPR RI bukan lembaga anti-kritik, karenanya penilaian objektif masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR RI diperlukan.

"DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, sehingga Gedung DPR adalah rumah rakyat. Karena itu, kita akan selalu

terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat," tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Di akhir pidatonya, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini mengutip tulisan Bung Karno yang dikutip dari Kitab Baghavad Gita. Pesan tersebut berisikan nasehat Kreshna pada Arjuna yang berbunyi, "*Karma Nevad Ni Adikaraste Ma Phalesu Kada Chana*".

"Lakukan kewajiban kita tanpa memikirkan untung ruginya. Kalau bukan kita yang mendapatkan manfaatnya, maka anak-anak kita yang akan menerimanya, kalau bukan anak-anak kita, maka cucu kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Gunakanlah kesempatan ini dalam bergotong royong memajukan bangsa dan negara," Puan menandaskan. ■ ann/sf

Rapat Perdana Bamus Periode 2019 – 2024 Digelar

Rapat Konsultasi Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI masa bakti 2019 – 2024 digelar hukum perdana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Rapat yang berlangsung secara tertutup dan dihadiri seluruh Ketua Fraksi di DPR RI ini, membahas sejumlah agenda DPR RI terkait penetapan Pimpinan Dewan 5 tahun ke depan.

Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan, Rapat Bamus berjalan dengan lancar, karena semua fraksi satu suara perihal penetapan

”

BERDASARKAN KETENTUAN UU MD3, KURSI PIMPINAN DPR RI AKAN DIISI OLEH LIMA PARTAI PERAIH SUARA TERBANYAK DALAM PEMILU 2019

Pimpinan Dewan periode 2019 – 2024. “Nampaknya semua yang hadir dalam rapat sudah satu suara, keputusan ini akan dibacakan dalam Rapat Paripurna jam 19.00 nanti, dan sekaligus pengucapan sumpah para Pimpinan Dewan,” jelasnya di Ruang Rapat Baleg.

Hal senada turut diungkapkan Ketua Fraksi PAN MulFachri Harahap. Ia yakin penetapan Pimpinan DPR RI periode ini terbilang mudah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Berbeda dengan DPR di masa lalu, dimana penetapan pimpinan melalui sistem paket dan kemudian dipilih anggota di Paripurna. Sesuai dengan UU MD3 kali ini, maka disampaikan Fraksi-Fraksi yang berhak menetapkan calon pimpinan dalam rapat Paripurna,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan UU MD3, kursi pimpinan DPR RI akan diisi oleh lima partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 lalu, yakni PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). ■ rnm,ann/sf



Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe. Foto: Jaka/HR

Komposisi Fraksi DPR Disahkan

Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe (F-Demokrat) dan Hillary Brigitta Lasut (F-NasDem) telah mengetuk palu yang menandakan pengesahan sembilan nama fraksi yang akan menghiasi kinerja DPR RI periode 2019-2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Komposisi fraksi DPR RI, nantinya akan diisi sebanyak sembilan fraksi atau berdasarkan pada partai pemenang Pemilu 2019.

Fraksi tersebut terdiri dari PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Sebelum disahkan, Abdul Wahab memberikan kesempatan kepada perwakilan partai

untuk menyebutkan struktur fraksi mereka. Selanjutnya kemudian anggota dewan tertua tersebut menanyakan persetujuan para anggota lain.

“Apakah seluruh hadirin dapat menyetujui fraksi-fraksi yang telah disebutkan untuk menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR pada masa bakti 2019-2024 ini. Apakah ini semua setuju?” tanya Abdul Wahab yang selanjutnya dijawab, “Setuju,” secara serentak oleh para Anggota Dewan yang hadir. Setelahnya politisi dapil Sumatera Utara tersebut meminta Sekretaris Jenderal DPR RI menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Dari seluruh fraksi di DPR RI periode 2019-2024, Fraksi PDI-Perjuangan dikatakan mendapat porsi terbanyak yaitu sebesar 128 kursi, kemudian

disusul Fraksi Golkar sebanyak 85 kursi, Fraksi Gerindra 78 kursi, dan Fraksi NasDem 59 kursi. Selanjutnya ada Fraksi PKB dengan 58 kursi, Fraksi Demokrat 54 kursi, Fraksi PKS dengan 50 kursi, Fraksi PAN dengan 44 kursi, kemudian terakhir Fraksi PPP dengan porsi sejumlah 19 kursi.

Selanjutnya dari keseluruhan fraksi partai politik di DPR ini juga telah menetapkan pimpinan fraksi mereka masing-masing. Dari total sembilan fraksi yang ada, hanya PDI-Perjuangan yang belum menentukan nama ketua dan susunan kepengurusan fraksi. “Pimpinan Fraksi PDI-Perjuangan dengan anggota 128, susunan pengurus akan kami serahkan besok,” terang Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Utut Adianto. ■ *er/sf*



Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe (F-Demokrat) dan Hillary Brigitta Lasut (F-NasDem). Foto: Jaka/HR

Ketua DPR Terpilih Janjikan Kinerja Parlemen Semakin Baik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2019-2024 Puan

Maharani menjanjikan di bawah kepemimpinannya bersama empat Wakil Ketua DPR RI terpilih yaitu Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco, Rachmad Gobel dan Muhaimin Iskandar akan bisa membawa DPR RI semakin lebih baik dalam melakukan kerjanya secara bergotong royong.

“Memang, dinamika politik akan berjalan secara dinamis di DPR. Insya Allah, kepemimpinan kami berlima bisa membawa DPR lebih baik melaksanakan tugasnya secara bergotong royong. Kami bersepakat,

”

KAMI BERSEPAKAT, BAHWA APAPUN YANG AKAN TERJADI DI DPR, KEPENTINGAN BANGSA NEGARA AKAN KAMI DAHULUKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT

bahwa apapun yang akan terjadi di DPR, kepentingan bangsa negara akan kami dahulukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Puan, usai disahkan menjadi Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengungkapkan, ke depannya ia bersama Pimpinan DPR RI lainnya akan melakukan



Ketua DPR RI Periode 2019-2024 Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI dan Anggota DPR RI menyampaikan sejumlah pernyataan kepada awak media. Foto: Sofyan/HR

rapat internal. Tujuannya, untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan apa yang akan menjadi prioritas kerja Pimpinan DPR RI terpilih.

“Tentu saja, Insya Allah kami akan melakukan rapat internal diantara kami untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan dalam kepemimpinan ini apa yang akan menjadi prioritas dari kerja kami bersama,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Selain itu berkaitan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anggota DPR RI terpilih, Puan menjelaskan ia tidak bisa menginstruksikan, mengingat Anggota Parlemen terdiri dari 9 Fraksi yang

menjadi perpanjangan tangan dari partai masing-masing. Namun demikian, selaku Ketua DPR RI ia mengimbau kepada seluruh legislator untuk bisa segera melaksanakan pelaporan LHKPN.

“DPR RI itu adalah kolektivitas, terdiri dari 9 Fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari DPP partainya masing-masing. Jadi, tentu saja nanti dalam rapat internal Pimpinan DPR RI, kami akan menghimbau kepada seluruh Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 untuk bisa segera melaporkan dan melaksanakan LHKPN,” pungkas Ketua DPR RI perempuan pertama dalam sejarah Parlemen Indonesia ini. ■ pun/sf

DPR Harus Komitmen pada Kepentingan Bangsa

Dewasa ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada institusi DPR RI. Bahkan akhir-akhir ini, protes pada kinerja legislasi DPR RI diwujudkan melalui aksi turun ke jalan atau demonstrasi. Tak hanya di Jakarta saja, aksi ini sudah menjalar ke berbagai daerah. Bahkan salah satu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebuah universitas meneriakkan mosi tidak percaya kepada DPR RI.

Menjawab semua itu, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 terpilih Rachmad Gobel menegaskan, tuntutan tersebut harus dijawab oleh seluruh Anggota DPR RI dengan kerja keras, komitmen serta integritas. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo menurutnya sudah berhasil menunjukkan integritas dan komitmennya kepada bangsa dan negara selama periode pertama.

“Presiden kita sudah berhasil menunjukkan integritasnya, komitmennya. Nah kita harus menyesuaikan dengan komitmennya dengan apa yang telah dilakukan oleh presiden. Menurut saya, kalau kemitraan antara DPR dengan pemerintah ini bisa kita angkat dan kita tunjukkan, ini akan lebih bagus. Dampak positifnya akan besar,” terang Rachmad usai penetapan Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Selain itu, dalam menjalankan fungsi DPR RI, akan lebih mudah bila dikerjakan dengan bergotong royong. Tak ada kata sulit, karena semuanya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun partai. “Pastinya nanti ada lobi-lobi politik, untuk menyamakan hati kita, menyamakan persepsi kita. Kita



Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 terpilih Rachmad Gobel. Foto: Sofyan/HR

”

KALAU KEMITRAAN ANTARA DPR DENGAN PEMERINTAH INI BISA KITA ANGGAT DAN KITA TUNJUKKAN, INI AKAN LEBIH BAGUS.

harus duduk bersama mengutamakan kepentingan nasional,” imbuhnya.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat, tentu harus memikul harapan-harapan rakyat. Harus memperjuangkan agar masyarakat bisa hidup lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, sebagaimana yang mereka sampaikan dan itu yang menjadi utama. Semuanya ini, lanjut Rachmad, harus

bisa dijabarkan ke dalam program-program yang akan diperjuangkan di DPR RI.

Terkait pembagian tugas dari masing-masing Wakil Ketua DPR RI, Rachmad mengatakan hal tersebut masih akan dibahas. Tidak ada permintaan dari Wakil Ketua DPR RI ini dan harapan khusus dari Rachmad, karena sesama wakil ketua sudah bersepakat untuk saling menopang satu sama lain.

Rachmad Gobel diketahui pernah menjadi Menteri Perdagangan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dari kalangan non parpol. Kemudian ia dilirik oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif 2019 di dapil Gorontalo dan berhasil melenggang ke Senayan dengan memperoleh 146.067 suara dari total 721.032 suara sah. ■ es

'Bang Doel' Berharap Ditugaskan di Komisi X

Salah satu aktris senior tanah air Rano Karno atau kerap disapa Bang Doel hari ini resmi diambil sumpah dan janjinya sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024. Legislator yang berhasil menduduki salah satu kursi di DPR RI berkat dukungan sebanyak 274.294 suara dari dapil Banten III ini berharap kelaknya ditugaskan di Komisi X DPR RI.

"Saya berharap ditugaskan di Komisi X, karena ruang lingkupnya adalah kebudayaan, pendidikan dan olahraga," kata Rano saat dijumpai **Parlementaria** jelang pengambilan sumpah/janji

Anggota DPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Meskipun besar harapan agar ditempatkan di Komisi X DPR RI, Rano mengaku siap bila ditempatkan di Komisi mana pun. "Kalau ditempatkan di komisi lain, ya siap," tegas Rano seraya menceritakan bahwasanya dirinya dan Anggota DPR RI lainnya sudah mendapat pembekalan saat di Lemhanas RI beberapa waktu lalu.

Ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait mulai lunturnya kepercayaan publik terhadap institusi Parlemen, Rano

menekankan sangat penting bagi DPR RI ke depannya untuk berbenah guna mengembalikan kepercayaan itu. "*Enggak* boleh juga kita apriori. Pada dasarnya, wakil rakyat itu mendengarkan suara rakyat. Itu intinya," tegasnya.

Ia mengajak, agar lebih memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. DPR harus seringkali mendengarkan aspirasi dari masyarakat. "Bangsa ini dibangun dengan dialog, mari kita bedialog. Dan tempat ini (DPR RI) dibangun untuk sama-sama berdialog berbangsa dan bernegara. Jadi *enggak* bisa ego," tutupnya. ■ es



Anggota DPR RI terpilih masa bakti 2019 - 2024 Rano Karno. Foto: Riska/HR

Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Anggota DPR Baru Siap Bekerja

Sebanyak 575 Anggota DPR RI Periode 2019-2024 secara resmi diambil sumpah/janjinya. Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe (80) dan Hillary Brigitta Lasut (23), dilangsungkan dengan pengucapan sumpah jabatan Anggota DPR, DPD, dan MPR dengan jumlah total 711 Anggota.

Menjadi wajah baru parlemen periode ini, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela mengatakan, dirinya siap memperjuangkan aspirasi rakyat saat bertugas nantinya. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan akan siap menerima kebijakan penugasan dari Fraksi.

”

**KALAU SAYA
PRIBADI, SAYA
TERIMA MASUK KE
KOMISI BERAPA
SAJA, KITA
SERAHKAN SAMA
KEBIJAKAN FRAKSI**

“Kalau saya pribadi, saya terima masuk ke Komisi berapa saja, kita serahkan sama kebijakan Fraksi. Saya *sih* terima-terima saja ditugaskan di komisi berapa,” kata Mulan, usai pelantikan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).



Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela. Foto: Singgih/HR

Meski demikian, Mulan telah memiliki pertimbangan khusus terkait Komisi mana yang akan ditematinya. Dengan *background* sebagai musisi, dirinya akan memperjuangkan hal tersebut dalam salah satu komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

“Mungkin lebih cocok di (Komisi) X. Kenapa ingin di Komisi X karena memang *basic*-nya saya dari dunia musisi dan ingin memperjuangkan itu. Tapi balik lagi kita serahkan semua kepada Fraksi,” ungkap

legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI yang meliputi Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan yang dikenal sebagai presenter dan mantan penyiar radio, juga akan menunggu keputusan Fraksi. Tidak hanya itu, dirinya akan membawa aspirasi terkait Posyandu, Pospindu, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Belum, belum (ditugaskan di Komisi). Kita tunggu pembentukan

”

**KITA TUNGGU
PEMBENTUKAN
KABINET DULU
BARU KITA AKAN
BIKIN (PENEMPATAN
DI) KOMISI. YANG
PENTING DALAM
LIMA TAHUN KE
DEPAN, ASPIRASI
YANG PENTING
POSYANDU,
POSPINDU, PAUD**



Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan. Foto: Sofyan/HR

kabinet dulu baru kita akan *bikin* (penempatan di) Komisi. Yang penting dalam lima tahun ke depan, aspirasi yang penting Posyandu, Pospindu, PAUD,” kata Farhan, yang baru dilantik mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Di sisi lain, harapan meningkatnya kinerja legislasi DPR RI juga

disampaikan oleh Dewan pendatang baru, Anggota DPR R Fraksi Partai Golkar Christina Aryani. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan merencanakan target-target legislasi dengan lebih realistis berdasarkan pada kejadian yang selama ini sudah terjadi.

“Semoga juga, kerja sama antara Pemerintah dan DPR bisa

berjalan selalu harmonis, lebih baik sehingga apa yang menjadi rencana kedepannya dapat dijalankan dengan baik. Karena banyak yang muda-muda, seharusnya energinya juga lebih lagi,” pungkas Anggota DPR ri baru dari daerah pemilihan DKI Jakarta III meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

■ alw/sf



Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani. Foto: Sofyan/HR

”

**KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH
DAN DPR BISA
BERJALAN SELALU
HARMONIS, LEBIH
BAIK SEHINGGA
APA YANG
MENJADI RENCANA
KEDEPANNYA
DAPAT DIJALANKAN
DENGAN BAIK**

Legislator Harapkan Lebih Banyak Keterwakilan Perempuan di Pentas Politik

Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Partai Gerindra Lis Rosita Dewi yang baru saja mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024, berharap keterwakilannya menjadi anggota legislatif bisa jadi pemicu bagi kemunculan politisi-politisi perempuan terutama dari partai yang dinaunginya, yakni Partai Gerindra.

“Jika selama ini saya mendukung peran suami saya (Edhi Prabowo) yang sudah jauh lebih dahulu menjadi anggota legislatif dari belakang, mulai hari ini, sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, kami akan bermitra dan berjalan berdampingan untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat luas, khususnya yang berada di dapil kami masing-masing,” ujar Lis usai pengucapan sumpah/janji Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (1/10).

Dijelaskan Lis, keinginannya berada di lembaga legislatif ini selain ingin menyuarakan hak-hak perempuan,

ia ingin mencontohkan kepada kaum perempuan agar tidak ragu untuk terjun ke dunia politik. Politik menurut Lis adalah cara dan seni yang identik dengan keindahan, oleh karenanya butuh juga sentuhan wanita. Tidak bisa dipungkiri, keterwakilan perempuan dalam sebuah partai politik saat ini masih sangat rendah, terutama yang ada di Fraksi Partai Gerindra.

Walaupun keterwakilan perempuan di partai politik sangat diharapkan, ia mengakui dan berharap agar wanita tidak melupakan kodratnya sebagai

seorang perempuan, ibu bagi anak-anaknya di rumah. Dengan kata lain, ketika berada di dalam rumah Lis pun harus siap menanggalkan seluruh atribut dan karir politiknya, dan kembali menjadi istri dan ibu bagi ketiga anaknya.

Terkait dengan pro dan kontra Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya tentang dengan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, terutama hubungan istri dengan suami, Lis menilai poin ini pada RKUHP itu memang harus ditinjau ulang.

“Saya menilai RUU KUHP itu memang harus ditinjau ulang ya. Karena menurut saya, banyak masalah yang lebih krusial yang harus dibuat atau diutamakan walaupun RKUHP itu pembahasannya memang sudah lama. Semoga dengan DPR yang baru ini, bisa memperbaiki hal tersebut. Artinya membuang yang buruk dan mempertahankan yang sudah baik,” pungkasnya. ■ ayu/es

Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Partai Gerindra Lis Rosita Dewi. Foto: Runi/HR

”

...KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK SANGAT DIHARAPKAN, IA MENGAKUI DAN BERHARAP AGAR WANITA TIDAK MELUPAKAN KODRATNYA SEBAGAI SEORANG PEREMPUAN...



Kinerja DPR Periode 2014-2019 Layak Diapresiasi



Anggota DPR RI terpilih masa bakti 2019 - 2024 dari Fraksi PDI-Perjuangan Krisdayanti. Foto: Geraldi/HR

Anggota DPR RI Krisdayanti yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024, tidak setuju bila DPR RI Periode 2014-2019 dikatakan tidak berhasil. Banyak produk legislasi yang telah dihasilkan dan sangat layak diapresiasi, begitu pula beberapa RUU yang *carry over*, pembahasannya sudah dirintis, dibahas secara komprehensif dan tinggal dilanjutkan saja.

“Kita jangan menggeneralisir bahwa semua kinerja DPR periode sebelumnya tidak berhasil. Buktinya di Komisi VIII kemarin mengesahkan Undang-undang Pesantren, Komisi X ada Undang-

Undang Ekraf (Ekonomi Kreatif),” tegasnya usai pengucapan sumpah dan janji sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang statusnya *carry over*, Krisdayanti berpandangan butuh semangat yang luar biasa dari Anggota DPR RI periode ini untuk bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan bahwa kami akan melanjutkan membahas undang-undang PKS ini dengan melibatkan, berdialog dan menyerap aspirasi dari orang-orang yang berkompeten tanpa

”

**BANYAK PRODUK
LEGISLASI YANG
TELAH DIHASILKAN
DAN SANGAT LAYAK
DIAPRESIASI...**

adanya titipan-titipan berujung pada penyengsaraan masyarakat,” ucapnya.

Sekali lagi, ia menekankan RUU PKS ini ke depan harus dipastikan mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama kaum wanita. “Mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia, Insya Allah kita semua bisa,” tandasnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait keinginan untuk ditempatkan pada komisi-komisi di DPR RI, Krisdayanti menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi PDI-Perjuangan. Namun tersirat jawaban keinginannya agar ditempatkan di komisi-komisi yang membidangi permasalahan, kesehatan atau kesenian.

“Komisi IX ada kesehatan, di Jawa Timur masih banyak ibu-ibu yang memiliki anak yang gagal tumbuh (stunting). Mereka harus mendapatkan pengetahuan untuk makanan yang eksklusif dan baik. Kemudian di Komisi X, memang menjadi *basic* saya. Kita harus tahu kompetensi kita dimana,” tandasnya.

Diketahui, salah satu diva Indonesia yang diusung oleh PDI Perjuangan di dapil Jawa Timur V ini berhasil melenggang ke Senayan setelah pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu mendapat dukungan 132.131 suara. ■ es

Ingin Angkat Lebih Banyak Isu Ekonomi

Anggota DPR RI periode 2019-2024 Rizki Aulia Rahman Natakusumah pembangunan yang telah dicapai pemerintah baik sekarang maupun sebelumnya harus dihargai. Kedepan, harus lebih banyak lagi isu-isu seperti *financial inclusion*, pemerataan pembangunan maupun pendidikan, karena itu merupakan wujud pembangunan karakter bangsa.

“Itu akan jadi isu-isu saya.

Basic pendidikan saya dari ekonomi dan fokus pada *development economic*. Mungkin kedepannya bisa mensumbangkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari untuk pembangunan di negara ini,” ucap Rizki usai mengikuti pengucapan sumpah dan janji sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara,

Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Politisi muda yang pada bulan November nanti akan genap berusia 25 tahun ini berharap, ilmu ekonomi yang didalamnya pada jenjang pendidikan S1 dan S2 di University of Nottingham Inggris ini bisa diimplementasikan bagi pembangunan di Indonesia.

Menanggapi polemik yang sedang hangat, yaitu maraknya



BASIC PENDIDIKAN SAYA DARI EKONOMI DAN FOKUS PADA DEVELOPMENT ECONOMIC. MUNGKIN KEDEPANNYA BISA MENSUMBANGSIHKAN ILMU-ILMU YANG TELAH SAYA PELAJARI UNTUK PEMBANGUNAN DI NEGARA INI

aksi unjuk rasa menolak beberapa regulasi diantaranya RUU KUHP dan UU KPK, Rizki mengatakan pada dasarnya seluruh undang-undang harus mencerminkan aspirasi dari masyarakat dan merupakan spirit dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Ke depan akan ada pembahasan-pembahasan lagi, menurut saya Insya Allah lebih mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Kita juga harus bisa menspesifikkan isu itu ke dalam suatu rumusan baik itu UU KPK ataupun RUU KUHP sehingga akan melahirkan undang-undang yang lebih merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan negara kita,” tutupnya.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, Rizki yang diusung oleh Partai Demokrat dari dapil Banten I dan berhasil memperoleh sebanyak 56.123 suara. Perolehan suara tersebut berhasil mengantarkan Rizki menjadi salah satu dari sepuluh politisi termuda yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menduduki kursi sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024. ■ es

Anggota DPR RI periode 2019-2024 Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Foto: Sofyan/HR



Ruang Publik DPR Akan Diperluas



Anggota DPR RI Rian Firmansyah. Foto: Sofyan/HR

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Rian Firmansyah mengaku akan menyuarakan pembukaan terhadap ruang-ruang publik di DPR RI untuk diperluas, karena menurutnya isu miring dan negatif tentang Parlemen disebabkan kurang terbukanya ruang publik pada institusi itu sendiri. Sehingga ia akan memperjuangkan hal tersebut hingga DPR RI dapat mendapat penilaian positif di mata masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan secara khusus kepada **Parlementaria** usai dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Menurut Rian, saat ini antara DPR RI dengan masyarakat seperti ada *missing links* atau komunikasi yang terputus, sehingga harus ada bentuk komunikasi yang dibangun kembali.

“Nah kita buka ruang-ruang publik sesuai dengan mekanisme di DPR. Apalagi kita generasi milenial, tentunya mewakili juga adik-adik mahasiswa kita bagaimana kita juga harus duduk bersama, berdiskusi apa yang menjadi pangkal masalahnya. Tentunya disesuaikan dengan komisi nanti. Ini menjadi agenda kita bersama,” tutur Rian.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menilai segala ego dan emosi dari seluruh pihak harus dikesampingkan untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional yang saat ini masih terus berlangsung seperti agenda mahasiswa menuntut RUU kontroversial hingga kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap DPR RI. Nilai persatuan dan kesatuan akan menjadi agenda yang akan ia perjuangkan di komisi nanti.

“Yang lebih penting adalah kita bangun komunikasi terkait dengan apapun yang terjadi di negeri kita apalagi terkait ruu yang kontroversial maka mari kita rembukkan itu. Harapannya seperti itu, karena ke depan masalah akan semakin kompleks lebih dari sekarang tentunya tantangan ke depan tanggung jawab kita bersama,” tukas politisi dapil Jawa Barat II tersebut.

Hal senada disampaikan Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari yang ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI. “Saya dilantik hari ini dalam situasi demonstrasi yang terjadi dimana-mana. Aksi ini bahkan mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga DPR, untuk itu tugas kita mengembalikan kepercayaan publik itu melalui kerja nyata,” tuturnya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi refleksi atas aksi aksi yang terjadi belakangan ini adalah bahwa DPR harus menjadi lembaga yang semakin transparan dan selalu mengedepankan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam pembuatan kebijakan. ■ *er/sf*



Anggota DPR RI Taufik Basari. Foto: Sofyan/HR

Legislator Akan Perjuangkan Masalah Pengangguran di NTB

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Krisyono menilai tingginya angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) NTB II menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusinya.

“Ketika berkampanye dan berkeliling di dapil saya NTB II, saya menemukan banyak sekali pemuda dalam usia produktif namun tidak bekerja alias menganggur. Salah satunya karena minimnya ketersediaan lapangan

kerja di NTB. Hal ini tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu, Insya Allah saya berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut,” ujar Bambang usai diambil sumpah/janji menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dilanjutkan Bambang, membuka lapangan pekerjaan tentu menjadi solusi, namun hal itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu opsi kedua untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di NTB. Salah satunya dengan memberikan ilmu

”

SAYA MEMANG INGIN MEMBERIKAN SEBUAH PERUBAHAN ATAU BERPERAN AKTIF LANGSUNG BAGI MASYARAKAT DI DAPIL SAYA YANG NOTABENE BERPROFESI SEBAGAI PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN.

pengetahuan yang mumpuni termasuk ketersediaan pupuk dan benih bagi masyarakat NTB yang notabene banyak mengandalkan hidupnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

“Saya memang ingin memberikan sebuah perubahan atau berperan aktif langsung bagi masyarakat di dapil saya yang notabene berprofesi sebagai petani, peternak dan nelayan. Dengan memperbanyak pelatihan plus pemberian pupuk dan benih, saya harap pemuda di NTB akan tergerak untuk menekuni bidang pertanian, peternakan dan nelayan. Hal itu bisa mengurangi angka pengangguran, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang saya wakili,” tambahnya.

Meski demikian, ia meyakini akan berusaha semaksimal mungkin menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama konstituennya di NTB. Hal tersebut sejalan dengan sumpah dan janji yang baru saja diucapkannya dalam pelantikan anggota DPR RI Periode 2019- 2024. ■ ayu/es



Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Krisyono. Foto: Runi/HR

Pejabat dan Pegawai Setjen dan BK DPR Dilantik

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, hingga kini masih terdapat jabatan kosong di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, salah satunya disebabkan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Karenanya, untuk mengisi kekosongan pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, dilakukan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Kalau secara alamiah memang di minggu-minggu lalu kita sudah melakukan seleksi jabatan-jabatan terkait. Dan hari ini kita lakukan pelantikan untuk mengisi jabatan terkait bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja kita (calon dilantik) kepada Anggota Dewan,” ungkap Indra usai melantik Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Lebih lanjut Indra akan konsisten mengingatkan para pejabat dan pegawai yang di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. “Berada di jabatan manapun diharapkan dapat bekerja dengan baik terlebih dapat memperbaiki penataan-penataan kembali terkait sistem kerja masing-masing,” tegas Indra.

Adapun pejabat struktural yang dilantik yakni, Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan); Sartomo (Kepala Bagian Upacara dan Pengaduan Masyarakat); Koko Surya Dharma (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana); dan Endang Dwi Astuti (Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota).



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat melantik Pejabat Tinggi Pratama dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Foto: Oji/HR

Berikutnya, Diah Aty Rachmawaty (Kepala Subbagian Kerumahtangaan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan); Ni'mah Wahyu Purnami (Kepala Subbagian Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana); Dwian Pujawati (Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Usaha Badan Keahlian); dan Parid (Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bagian Kendaraan).

Kemudian Karyanto (Kepala Subbagian Tatat Persuratan Bagian Persuratan dan Penyimpanan); Dahliya Bahnan (Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat Komisi II); Susi Daryati (Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang); Beny Rahbandiyosa Sabri (Kepala Subbagian Tata Laksana Bagian Organisasi Tata Laksana); dan Agung Sulistiono (Kepala Subbagian Tata Usaha Persidangan Paripurna).

Selanjutnya, Miranti Widiani (Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional), dan Tanti Sumartini (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang) dan Furcony Putri Syakura (Inspektur II). Sedangkan pejabat fungsional yang dilantik yakni Debora Sanur Lindawaty (Peneliti Ahli Madya); Martha Carolina (Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara Ahli Madya). ■ hnm/sf

Pancasila Satukan Bangsa Melalui Persatuan

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menyatakan, meskipun akhir-akhir ini Pancasila mengalami ujian yang tidak mudah, baik dari dalam maupun luar negeri, namun Pancasila justru semakin teruji keberadaannya untuk menyatukan bangsa melalui persatuan, kesatuan dan keutuhan Pancasila. Mengingat keberadaan Pancasila telah menyadarkan seluruh pihak sebagai dasar negara.

“Pancasila menyadarkan bagi kita sebagai dasar negara yang betul-betul dapat diterima dan sebagai solusi yang bijak dari berbagai kebhinnekaan yang kita miliki selama ini,” katanya usai menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia”, di Halaman Gedung Setjen DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Terkait dengan tema Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, Donny biasa ia disapa mengatakan, bahwa tema tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk mencerdaskan bangsa, memelihara ketertiban dunia dan sebagainya, sehingga seluruh pihak bertekad untuk mencapai tujuan tersebut.

“Jadi, tujuan bernegara dan pemerintahan pasti menyangkut masalah keadilan, masalah kesejahteraan, dan memajukan kesejahteraan umum. Khusus bagi DPD sendiri, Setelah bagaimana sering disampaikan oleh pimpinan kita tidak ada Indonesia maju, tanpa daerah maju,” ungkap Donny.

Sebagai Sesjen DPD RI, Donny menegaskan bahwa daerah harus maju dan makmur juga bahagia terlebih

dahulu, baru kemudian disusul oleh daerah maju lainnya untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, sehingga saat itulah Indonesia dapat maju dan makmur. Ia juga mendorong seluruh pihak untuk mengembangkan diri dan kompetensinya, khususnya generasi muda agar dapat meregenerasi bangsa di kemudian hari.

“Tentunya kita semua dari Kesetjengan bertekad untuk memberikan dorongan, kesempatan bagi siapapun yang punya fasilitas, kemampuan untuk dapat mengembangkan jati dirinya, kompetensinya, dan kapasitasnya. Termasuk juga nanti ke depannya merekalah yang memegang bangku kepemimpinan dalam proses regenerasi yang tentunya akan berkolerasi dengan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, maupun kemajuan bagi teman-teman kita semua di DPD RI,” tutupnya. ■ ndy/sf



Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Foto: Runi/HR

DPR Periode 2014-2019 Selesaikan 91 RUU



Suasana Rapat Paripurna penutupan Masa Bakti Anggota DPR RI Periode 2014-2019. Foto: Jaka/HR

Ketua DPR RI periode 2014-2019 Bambang Soesatyo mengungkapkan selama kurun waktu lima tahun pada periode 2014-2019, DPR RI telah bekerja keras dan berjuang dengan sepenuh hati untuk mewujudkan aspirasi dan harapan rakyat. Segala daya dan upaya telah dikerahkan agar amanah rakyat dapat ditunaikan, termasuk dalam fungsi legislasi.

Banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diselesaikan. Politik anggaran untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga telah dilaksanakan. Pengawasan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah

dan pembangunan juga sudah dilakukan.

“Sampai tanggal 29 September 2019, DPR RI telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri dari 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU kumulatif terbuka,” ungkap Bamsuet, sapaan akrabnya, saat membacakan laporan pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Menjelang akhir masa bakti DPR RI, Dewan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan berbagai RUU guna disetujui bersama pemerintah, antara lain; RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

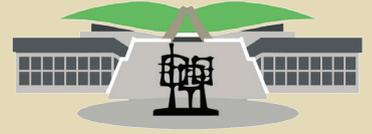
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, RUU tentang APBN 2020; dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kemudian RUU tentang Pekerja Sosial, RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; RUU tentang Sumber Daya Air; dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikutnya, RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; RUU tentang Ekonomi Kreatif; RUU tentang Pesantren; dan terakhir RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Namun, masih terdapat sejumlah RUU Prioritas yang masih dalam pembicaraan tingkat I di Komisi dan Pansus yang belum diselesaikan.

Bamsuet menjelaskan, sejumlah RUU itu antara lain; RUU tentang Pertanahan; RUU tentang Daerah Kepulauan; RUU tentang Kewirausahaan Nasional; RUU tentang Desain Industri; RUU tentang Bea Materai; RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; RUU tentang Pertembakauan; RUU tentang Perkoperasian; dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

“Kami berharap sejumlah RUU yang tidak dapat diselesaikan tersebut dapat dibahas pada masa keanggotaan DPR periode mendatang, mengingat *carry over* legislasi sudah ada landasan hukumnya. Namun, kami juga menyadari masih ada aspirasi, kritikan dan harapan rakyat yang belum dapat kami wujudkan. Untuk itu, izinkan kami menitipkan aspirasi dan harapan rakyat tersebut kepada para anggota Dewan yang baru untuk memperjuangkan sebaik-baiknya.” Tutup Bamsuet. ■ rnm/sf



Suasana Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengucapan sumpah/janji 575 Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Foto: Ojji/HR



Rapat Paripurna DPR RI penetapan dan pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Foto: Kresno,Andri/HR



Suasana Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda penetapan dan pelantikan Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Foto: Gerald,Arief/HR

